

Repository policies in four higher education libraries in Surabaya, East Java **Kebijakan repositori di empat perpustakaan perguruan tinggi di Surabaya, Jawa Timur**

Ari Zuntriana¹, Dian Anesti, Mufid²

^{1,2}Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jalan Gajayana 50 Malang

Article Info

Corresponding Author:

Ari Zuntriana

✉ ari.zuntriana@uin-malang.ac.id

History:

Submitted: 02-12-2025

Revised: 27-02-2025

Accepted: 21-03-2025

Keyword:

*repository policies; e-theses
repository; institutional
repository governance*

Kata Kunci:

kebijakan repositori; repositori
tugas akhir; tata kelola repositori

Abstract

Introduction. This research examines the electronic theses and dissertation repository policies at four universities in Surabaya, namely UIN Sunan Ampel, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, and Universitas Kristen Petra. It explores the policy formulation process and evaluates whether the existing policies have considered good repository governance practices, such as data protection, notice and take-down policy, and data reuse.

Research Methods. This study employs a descriptive qualitative approach, using interviews, policy documents, and writing guidelines as primary data sources.

Data analysis. Data was analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis model, which consists of data collection, data reduction, data display, and conclusion.

Results. The policy formulation process follows a top-down approach involving university rectors/vice rectors, library heads, and librarians. The top managements determine the publication model and embargo periods. However, repository policies remain incomplete, with some still verbally communicated rather than properly documented.

Conclusion. Repository policies are still heavily influenced by university leaders, so the focus is currently on access restrictions and embargoes to increase the number of publications, rather than improving governance. The role of librarians in raising awareness and advocating for open access is necessary.

Abstrak

Pendahuluan. Penelitian ini mengkaji kebijakan repositori TA di empat perguruan tinggi di Surabaya, yaitu UIN Sunan Ampel, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan UK Petra. Peneliti menggali proses perumusan kebijakan dan melihat apakah kebijakan yang ada telah mempertimbangkan aspek-aspek tata kelola repositori yang baik, seperti adanya pernyataan tentang perlindungan data, pedoman pelaporan dan penurunan karya ilmiah, penggunaan ulang data, dan sebagainya.

Metode penelitian. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif dengan data primer berupa hasil wawancara, dokumen kebijakan, dan pedoman penulisan TA.

Data analisis. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti menerapkan model analisis interaktif Miles dan Huberman untuk menganalisis data.

Hasil. Proses perumusan kebijakan telah melibatkan pimpinan perguruan tinggi, kepala perpustakaan, dan pustakawan dengan menggunakan pendekatan *top-down*. Hal ini terlihat dari adanya instruksi pimpinan ke perpustakaan terkait model publikasi dan pemberlakuan periode embargo. Kebijakan terkait konten repositori masih belum komprehensif dan terperinci, masih ada yang berbasis lisan, dan belum terdokumentasi dengan baik.

Kesimpulan. Kebijakan repositori masih sangat dipengaruhi oleh pimpinan perguruan tinggi, sehingga fokusnya saat ini masih pada pembatasan akses dan penerapan embargo untuk peningkatan jumlah publikasi ilmiah, bukan perbaikan tata kelolanya. Peran pustakawan dalam meningkatkan kesadaran dan mengadvokasi akses terbuka masih banyak diperlukan.



Copyright © 2025 by
Berkala Ilmu Perpustakaan
dan Informasi

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the UGM Library and Archives.

 <https://doi.org/10.22146/bip.v21i1.18020>

A. PENDAHULUAN

Repositori tugas akhir (TA) memiliki peran penting dalam upaya preservasi dan diseminasi konten lokal perguruan tinggi. Laporan penelitian mahasiswa yang sebelumnya hanya tersimpan di perpustakaan, sekarang tersedia secara daring dan dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. Oleh karenanya, banyak pihak yang memandang bahwa repositori juga berpotensi meningkatkan visibilitas riset dan mendongkrak citra serta peringkat institusi. Menyadari hal tersebut, banyak perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia yang kini mengembangkan repositori TA. Berdasarkan data RAMA di (<https://rama.kemdikbud.go.id/>), per 7 September 2024 tercatat telah ada 286 repositori perguruan tinggi di Indonesia. Jumlah ini mungkin belum mencakup sebagian perguruan tinggi yang belum mendaftarkan repositorinya.

Repositori TA adalah sumber informasi ilmiah yang mengarsip hasil penelitian mahasiswa yang terfokus dan mendalam bersama dosen pembimbing mereka (Loan & Shah, 2020). Repositori ini berperan sebagai media utama bagi mahasiswa untuk menampilkan hasil penelitiannya sekaligus menjadi arsip pengetahuan bagi perguruan tinggi. Keberadaannya juga memudahkan warga akademik dan masyarakat untuk mengetahui perkembangan tren penelitian. Repositori, oleh karena itu, juga bisa digunakan untuk meminimalisir redudansi penelitian dan kejenuhan topik sekaligus mendorong efisiensi sumber daya riset. Repositori juga merupakan bagian dari skema besar komunikasi ilmiah yaitu ekosistem untuk menghasilkan, menganalisis, mengemas, serta menyebarkan pengetahuan ilmiah dan pengetahuan baru (Anderson, 2018). Ekosistem ini kompleks dan secara kultur telah terbangun dan tersebar secara meluas praktiknya.

Sebelum teknologi pengarsipan karya ilmiah dikembangkan, TA mahasiswa hanya dapat diakses melalui rak-rak perpustakaan. Perpustakaan biasanya menyediakan ruang khusus dengan petugas dan membatasi

jumlah halaman yang bisa difotokopi oleh pemustaka. Perangkat lunak untuk membangun repositori, seperti *EPrints* dan *DSpace*, relatif belum banyak digunakan di Indonesia. Beberapa perguruan tinggi telah mulai mengembangkan sistem repositori mereka sendiri. Namun, lebih banyak perpustakaan yang belum tersentuh teknologi dan masih melayani koleksi TA secara konvensional.

Akses pengetahuan yang terbatas juga diperparah dengan harga buku yang relatif mahal dan distribusinya yang tidak merata di Indonesia, terutama di luar Jawa. Selain itu, pelanggan jurnal elektronik internasional juga berbiaya tinggi. Hal ini tentu memberatkan bagi perguruan tinggi kecil dan menengah yang memiliki anggaran terbatas. Repositori TA kemudian menjadi salah satu opsi untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Sebagai salah satu sumber pengetahuan ilmiah bagi warga akademik maupun masyarakat umum, repositori perlu terus dikembangkan dan didukung dengan kebijakan kuat dari lembaga, terutama terkait prinsip akses terbuka (*open access/OA*).

Akses terbuka merupakan upaya untuk membuat sebuah dokumen bisa diakses dan dimanfaatkan oleh publik bergantung pada jenis lisensinya (Logullo et al., 2024). Prinsip akses terbuka menekankan adanya unsur kesegeraan, yaitu karya dapat diakses dengan cepat oleh publik dan tanpa ada biaya yang dibebankan kepada pengguna. Koleksi repositori yang menerapkan akses terbuka umumnya telah berlisensi terbuka dan menggunakan skema lisensi *Creative Commons*. Lisensi terbuka memungkinkan pengguna untuk mengetahui izin apa saja yang dibagi penulis dengan publik tanpa melalui proses korespondensi (Kreutzer, 2015). Repositori TA merupakan salah satu bentuk penerapan akses terbuka hijau (*green OA*) atau pengarsipan mandiri. Pengarsipan mandiri mengacu pada kegiatan individu untuk menyimpan dan mendiseminasi karya terpublikasi melalui platform daring, seperti repositori institusi dan repositori subjek.

Kebijakan mengenai repositori TA di Indonesia saat ini cenderung masih berfokus pada aspek serah simpan karya oleh

perpustakaan. Perguruan tinggi menggunakan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi nomor 2050/E/T/2011 perihal Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal sebagai dasar acuan. Kebijakan serah simpan karya ini mengharuskan mahasiswa untuk mengarsip berkas TA mereka di repositori institusi. Kebijakan turunannya umumnya berupa keputusan rektor dan peraturan rektor tentang kewajiban serah simpan karya ilmiah. SK rektor berperan sebagai mandat yang mewajibkan mahasiswa mengunggah karya di repositori. Namun, banyak perpustakaan belum memiliki pedoman publikasi yang mengatur hal-hal mendasar tentang tata kelola repositori (Nurohman & Aprillilah, 2024).

Kebijakan mandat bertujuan untuk memaksimalkan visibilitas, aksesibilitas, serta preservasi karya penelitian yang dihasilkan oleh sivitas akademika. Dalam sejarah akses terbuka, para pegiat mendorong adanya mandat bagi penyandang dana penelitian dan lembaga riset untuk membuka akses publik laporan penelitian. Kebijakan mandat ini berperan sebagai solusi cepat atas berbagai hambatan budaya dan manajerial dalam pengembangan repositori. Tanpa mandat, repositori perlu waktu lama untuk memperkaya koleksi dan berkembang. Mandat juga menjadi salah satu cara untuk menjaga keberlangsungan repositori TA. Sebaliknya, ketiadaan mandat beserta petunjuk teknisnya mengakibatkan munculnya ketidakpastian aturan dan menjadi penghambat dalam pengelolaan repositori (Adam & Kaur, 2021). Hal ini beresiko pada inkonsistensi dalam implementasi repositori, misalnya aturan yang berubah-ubah untuk mengakomodir kepentingan pihak tertentu. Dasar hukum atau pedoman publikasi repositori yang tidak jelas justru menjadi kendala bagi pengelola perpustakaan (Nurohman & Aprillilah, 2024). Belum adanya kebijakan yang tegas dan jelas juga berpotensi menyulitkan masyarakat. Kasus yang sering terjadi adalah ketidakjelasan informasi prosedur pelaporan bagi masyarakat yang terdampak hasil

penelitian. Beberapa kasus yang pernah dilaporkan antara lain adalah permintaan penurunan karya karena pengungkapan data pribadi informan dan data sensitif milik perusahaan yang menjadi objek penelitian.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji aspek kebijakan dalam repositori TA. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa repositori perguruan tinggi di Indonesia memiliki tiga model akses, yaitu model akses terbuka, akses tertutup, dan akses terbatas (Nurohman & Aprillilah, 2024). Beragamnya model akses ini dilatari oleh masih minimnya kebijakan repositori dan peran manajemen perguruan tinggi, fakultas, perpustakaan, serta unit-unit terkait dalam merumuskannya. Selain itu, perpustakaan yang belum menerapkan akses terbuka juga memiliki kekhawatiran terkait keamanan data di repositori (Pratama, 2018). Sampai saat ini penelitian di Indonesia yang secara spesifik membahas kebijakan dan tata kelola repositori. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan kebijakan repositori dan bagaimana kebijakan konten diatur di dalam peraturan yang ada?

Studi mengenai kebijakan repositori penting dilakukan untuk melihat sejauh mana perpustakaan perguruan tinggi telah mempertimbangkan aspek tata kelola dan kebijakan repositori yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perumusan kebijakan dan melihat apakah kebijakan yang ada telah mempertimbangkan aspek-aspek tata kelola repositori yang terstandar, seperti adanya pernyataan hak cipta dan lisensi, penggunaan ulang data, dan sebagainya. Empat perguruan tinggi di Surabaya, Jawa Timur, yaitu Perpustakaan UIN Sunan Ampel, Perpustakaan ITS, Perpustakaan UK Petra, dan Perpustakaan Universitas Airlangga.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum era repositori, sejumlah perpustakaan telah mulai mengarsip dan melayani koleksi TA dengan media berupa mikrofilm, yang lalu berkembang ke format CD, DVD, dan pangkalan data elektronik (Rasuli et al., 2023). Sejumlah

perusahaan komersial, seperti Proquest, menawarkan akses berlangganan ke layanan TA melalui beragam perangkat. Perkembangan repositori secara spesifik dimulai dari repositori subjek yang dikembangkan oleh ilmuwan bidang fisika dan matematika. Repositori subjek merupakan repositori yang secara khusus dirancang untuk mengarsip dan mendiseminasi hasil penelitian dalam bidang disiplin ilmu tertentu. Repositori subjek tertua di dunia adalah *arXiv.org* dan *Mathematical Physics Preprint Archive* (mp_arc) (Bashir et al., 2022).

Dalam sejarahnya, repositori akses terbuka berkembang menjadi repositori institusi, repositori pemerintah, repositori agregator, dan repositori subjek (Bashir et al., 2022). Repositori mengarsip pra-cetak dan pasca-cetak artikel hasil penelitian. Pra-cetak adalah versi awal naskah ilmiah yang biasanya belum melewati proses tinjauan tradisional. Sedangkan pasca-cetak merupakan manuskrip yang telah ditinjau dan diterima untuk publikasi. Seiring dengan penggunaan repositori di perguruan tinggi pada awal 2000-an, berkas TA ditambahkan dalam koleksi. Berdasarkan laporan pada Mei 2022, lebih dari 60% atau lebih dari 3400 repositori yang terdaftar di OpenDOAR memuat koleksi TA (Rasuli et al., 2023).

Repositori TA mulai dikenal di Indonesia pada 2000-an, tetapi belum banyak perpustakaan yang mengadopsinya pada saat itu. Institut Teknologi Bandung (ITB) menjadi salah satu pelopor pengembang platform repositori dengan *Ganesha Digital Library* (GDL). Platform tersebut dikembangkan oleh *Knowledge Management Research Group* (KMRG) ITB pada 2002/2003 (Arvelina et al., 2022). Beberapa perpustakaan perguruan tinggi lain juga pernah menggunakannya, antara lain UIN Sunan Ampel, ITS, dan Universitas Airlangga. Seiring dengan munculnya platform repositori sumber terbuka lainnya dan tuntutan kebutuhan perpustakaan yang semakin kompleks, GDL pun mulai tergantikan. Sejak 2019, repositori perguruan tinggi yang telah terdaftar diintegrasikan ke dalam sistem RAMA oleh Kemenristekdikti.

Dalam praktiknya, perguruan tinggi di Indonesia dan luar negeri ada yang menggabungkan koleksi karya dosen/tendik dengan karya mahasiswa dalam satu situs web, ada pula yang memisahkannya. Terdapat beberapa domain yang digunakan oleh perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia untuk menyebut repositori institusi, antara lain repository, eprints, digilib, etheses, IDR, dan ETD (Nurohman & Aprillilah, 2024). Kebanyakan perguruan tinggi di Indonesia saat ini menggunakan platform *EPrints* dan *DSpace* untuk membangun repositori. Hanya sebagian kecil yang memanfaatkan perangkat lunak lain ataupun mengembangkan sistem sendiri.

Selain mengarsip dan melestarikan kekayaan intelektual yang dihasilkan warga akademik, repositori institusi disebut mampu mengakselerasi inovasi dalam penelitian. Prinsip kesegeraan dalam akses terbuka memungkinkan koleksi TA untuk berkontribusi lebih cepat bagi kepentingan masyarakat, terutama dalam kondisi-kondisi darurat yang menuntut adanya kecepatan publikasi hasil riset, misalnya saat pandemi COVID-19. Sejumlah penerbit juga mencabut embargo ke penelitian bidang medis dan kesehatan masyarakat pada saat itu (Kirkman & Haddow, 2021). Hal ini menunjukkan manfaat akses terbuka yang besar dalam pengembangan pengetahuan. Saat kontak dan interaksi fisik sangat dibatasi di masa pandemi, repositori institusi berperan besar menyediakan akses ke sumber ilmiah bagi masyarakat.

Sejumlah peneliti juga menganggap bahwa repositori institusi merupakan salah satu tempat terbaik untuk publikasi dan preservasi karya riset (Darragh et al., 2024). Dukungan infrastruktur dan SDM disebut sebagai sumber kekuatannya. Kesadaran kalangan akademisi tentang pentingnya sumber informasi akses terbuka juga ditemukan semakin menguat pada saat pandemi (Turgut et al., 2022). Berdasarkan hasil riset yang sama, lebih dari separuh responden menyatakan menggunakan artikel akses terbuka untuk penelitian mereka. Para pustakawan juga melihat potensi repositori institusi selama masa pandemi dan

mendorong adanya strategi yang lebih kuat untuk meningkatkan visibilitas repositori (Ali & Saleem, 2021).

Beberapa studi yang menyoroti kebijakan repositori di Indonesia. Penelitian kebijakan repositori di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) menemukan bahwa 72% repositori PTKIN telah menerapkan akses terbuka (Nurohman & Aprillilah, 2024). Secara umum ada tiga model akses, yaitu terbuka, terbatas, dan tertutup. Dasar hukum pengelolaan repositori yang umum digunakan adalah surat keputusan rektor. Namun, hampir semua repositori belum memiliki pedoman publikasi. Dalam studi tersebut, tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan pedoman publikasi. Peneliti menuliskan salah satu jawaban informannya yang menguraikan pentingnya kebijakan lain sebelum publikasi dalam menerapkan akses terbuka, yang antara lain berupa “tingkat plagiasi, etika penulisan karya penelitian terutama penelitian lapangan yang melibatkan responden dan informan, siapa yang pihak yang berwenang melakukan kontrol [sic], siapa yang berwenang mengoperasikan.” (Nurohman & Aprillilah, 2024, hal. 65). Kebijakan pra penelitian dan publikasi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari kebijakan repositori, tetapi lebih mendekati konsep klirens etik.

Penelitian lain yang dilakukan di lingkungan PTKIN melihat pola kebijakan repositori yaitu pilihan model akses yang diterapkan (Rodliyah, 2023). Hasilnya hampir sama, ada tiga jenis model akses, yaitu akses terbuka ke semua bagian karya, akses ke beberapa bagian dokumen, dan akses ke abstrak dan metadata. Latar belakang profesi dan pendidikan kepala perpustakaan turut mempengaruhi pilihan model akses. PTKIN yang dipimpin oleh pustakawan atau berlatar belakang ilmu perpustakaan cenderung memilih akses terbuka. Sedangkan kepala perpustakaan yang bukan pustakawan dan tidak berlatar belakang ilmu perpustakaan, cenderung memilih membuka akses ke beberapa dokumen atau bahkan hanya akses ke abstrak dan metadata. Sebanyak 65% pustakawan

mendukung penerapan akses terbuka pada repositori. Namun, beberapa di antaranya mengaku menghadapi tantangan dalam meyakinkan pimpinan untuk mengimplementasikan kebijakan akses terbuka.

Kebijakan repositori sejatinya merupakan konsep yang luas. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan repositori dibatasi pada aspek konten dan mencakup beberapa hal, yaitu model publikasi; periode embargo; perlindungan data dan privasi; hak cipta dan lisensi; penggunaan ulang data; serta pelaporan dan penurunan karya. Model publikasi adalah pendekatan yang diterapkan dalam penerbitan ilmiah, misalnya akses terbuka, terbatas, dan tertutup (Holzman & Lippincott, 2019). Periode embargo merupakan rentang waktu antara pengunggahan dan karya mulai tersedia secara akses terbuka, biasanya dari enam bulan hingga beberapa tahun (Rasuli et al., 2023). Pelindungan data dan privasi mengacu pada semua upaya untuk melindungi data pribadi, terutama yang dikumpulkan melalui sistem aplikasi daring (Hidayanto et al., 2020). Hak cipta dan lisensi didefinisikan sebagai pernyataan tentang hak cipta karya dan lisensi terbuka yang digunakan, misalnya penggunaan lisensi *Creative Commons* yang dipilih (Fahey et al., 2016). Penggunaan ulang data adalah analisis terhadap data studi yang telah ada untuk kepentingan penelitian baru (Sandt et al., 2019). Sedangkan pelaporan dan penurunan karya merujuk pada prosedur dan mekanisme pelaporan karya untuk diturunkan dari akses publik (Zhang, 2017). Penurunan karya tidak serta merta berarti karya dihapus dari repositori.

Dalam sejarahnya, akses terbuka di Indonesia tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus dan linear. Pengembangan repositori perguruan tinggi juga tidak murni didasari oleh motif-motif altruistik, seperti keinginan berbagi pengetahuan atau membuka akses publik ke karya intelektual kampus. Perguruan tinggi yang mengembangkan repositori dengan motif mengejar pemeringkatan universitas, ini terungkap dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Perguruan tinggi umumnya menerapkan

repositori untuk mengejar ranking dunia dan Webometrics (Priyanto, 2015). Namun, tidak menafikan kemungkinan perguruan tinggi yang memiliki beberapa motif sekaligus dalam mengembangkan repositori TA. Hal ini merupakan bagian dari kompleksitas dan dinamika sejarah perkembangan repositori di Indonesia.

Faktor kepemimpinan perguruan tinggi juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pengembangan repositori. Mereka terdiri atas rektor dan jajarannya, para anggota senat, dekan, dan kepala unit terkait. Pengaruh dan sikap mereka terhadap perubahan dan inovasi baru menentukan nasib repositori. Jika kultur organisasi berpusat pada satu, dua, atau sedikit orang (tersentralisasi), maka seluruh keputusan relatif mutlak di tangan orang-orang tersebut. Sebaliknya, kepemimpinan kolaboratif dengan kewenangan yang terdesentralisasi berpotensi menunjang keberhasilan repositori institusi (Seaman, 2017). Sementara itu, pergantian pimpinan bisa menjadi penyebab adanya kesan inkonsistensi komitmen perguruan tinggi terhadap penerapan akses terbuka di repositori (Zuntriana, 2017).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan metode deskriptif. Studi kualitatif berfokus pada upaya memahami dan menjelaskan fenomena sosial melalui perspektif individu dan kelompok. Dalam rangka menggali fenomena dengan lebih mendalam, peneliti mengumpulkan data naratif melalui desain penelitian yang fleksibel (Moser & Korstjens, 2017). Data kualitatif umumnya diperoleh melalui eksplorasi pengalaman, persepsi, sikap, dan perilaku para partisipan (Tenny et al., 2024) di lingkungan alamiah mereka. Studi ini bertujuan untuk mengetahui proses perumusan kebijakan repositori TA di perguruan tinggi, dan mendeskripsikan kebijakan terkait konten yang diterapkan oleh pengelola repositori TA. Pendekatan deskriptif, paling sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Keempat perpustakaan di Surabaya yang terlibat adalah Perpustakaan UIN Sunan Ampel, Perpustakaan Universitas

Airlangga, Perpustakaan ITS, dan Perpustakaan UK Petra. Keempatnya dipilih sebagai lokasi penelitian karena mereka telah mengembangkan repositori cukup lama di Jawa Timur. Keempat manajemen perpustakaan tersebut dengan segera menyatakan kesediaannya menjadi lokasi penelitian pada kurun waktu studi yang telah ditentukan.

Pengumpulan data penelitian melalui wawancara langsung, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Data dikumpulkan dengan menerapkan wawancara semi terstruktur yang melibatkan empat informan di seluruh perpustakaan. Mereka adalah manajemen perpustakaan dan pustakawan yang mengikuti dan mengetahui proses perumusan kebijakan repositori TA di tempat masing-masing serta merupakan pengelola repositori. Peneliti mewawancarai manajemen perpustakaan di salah satu perguruan tinggi. Sedangkan di tiga perpustakaan yang lain, tim peneliti mewawancarai para pustakawan yang terlibat dalam tugas pengelolaan repositori. Peneliti menyamarkan identitas informan untuk melindungi privasi mereka.

Jumlah narasumber ini bukan merupakan batasan, tetapi lebih kepada pertimbangan bahwa orang-orang tersebut benar-benar bisa memberikan data yang valid dan relevan dengan tujuan penelitian. Dalam studi ini, peneliti berinteraksi dengan para narasumber di tempat mereka bekerja. Hal ini bertujuan agar tercipta kenyamanan selama proses wawancara, sehingga mereka bisa memberikan data dan informasi yang valid tanpa merasa terpaksa. Wawancara dilakukan pada rentang Agustus hingga Oktober 2024.

Peneliti juga mengumpulkan dan menganalisis dokumen berupa kebijakan dan pedoman, seperti surat keputusan dan edaran rektor tentang repositori dan panduan penyusunan TA. Selain itu, mengobservasi situs web repositori untuk melihat kebijakan terkait konten yang tersedia. Selanjutnya, karena studi ini tergolong sebagai penelitian deskriptif analitik, menerapkan teknik analisis data kualitatif Matthew dan Huberman untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Proses yang dilakukan

meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Usman & Akbar, 2024). Data yang diperoleh dari wawancara maupun seluruh dokumen dan informasi kebijakan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan tersebut. Masing-masing perpustakaan memiliki pendekatan kebijakan pengelolaan repositori yang khas. Kekhasan tersebut menjadi penekanan dalam penyajian data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses perumusan kebijakan repositori TA

Perpustakaan UIN Sunan Ampel

Perpustakaan UIN Sunan Ampel menyusun kebijakan repositori dengan melibatkan pimpinan perguruan tinggi, kepala perpustakaan, dan pustakawan. Pimpinan perguruan tinggi berperan menginisiasi rapat perumusan kebijakan repositori. Hasil dari pertemuan tersebut berupa Surat Keputusan (SK) Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor 1308 Tahun 2023 tentang Wajib Serah Simpan Karya Ilmiah Civitas Academica UIN Sunan Ampel Surabaya. SK ini sekaligus menggantikan kebijakan sebelumnya, yaitu SK Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor Un.07/1/KS.01.2/SK/89/P/2016 dengan perihal yang sama. Mahasiswa dan publik bisa mengakses dokumen SK di situs web repositori UIN Sunan Ampel, <http://repository.uinsa.ac.id>. Perpustakaan UIN Sunan Ampel memisahkan koleksi TA dari karya dosen/tendik dengan menyimpannya di repositori TA yang beralamatkan di <https://digilib.uinsa.ac.id/>.

UIN Sunan Ampel telah mengembangkan repositori TA cukup lama dengan GDL sebagai platform pertama, dan saat ini mereka menggunakan *EPrints*. Penerbitan SK baru pada 2023 menandai adanya perubahan kebijakan akses repositori TA di UIN Sunan Ampel, yaitu pemberlakuan periode embargo secara wajib (*mandatory embargo*). Rektor yang menjabat saat ini memiliki program *One Semester One Article* untuk mendorong para dosen agar lebih produktif menerbitkan karya. Langkah

yang kemudian dilakukan adalah menerbitkan TA mahasiswa menjadi artikel jurnal dengan dosen pembimbing sebagai *co-author*. Konsekuensinya, seluruh karya mahasiswa sejak akhir 2023 diembargo selama tiga tahun tanpa terkecuali. Sebelum adanya SK terbaru, UIN Sunan Ampel menerapkan kebijakan akses terbuka segera (*immediate OA*) ke hampir seluruh TA. Saat itu, embargo hanya diterapkan ketika mahasiswa mengajukannya, umumnya terkait publikasi jurnal dan informasi sensitif/rahasia. Narasumber yang merupakan pustakawan menekankan pentingnya perpustakaan mengakomodasi dan mendukung kebutuhan dan kepentingan pimpinan perguruan tinggi dan dosen untuk menerbitkan karya ilmiah.

“Ya kita merumuskan juga arahan dari Warek 1, jadi tetap ada ruang diskusi lah waktu itu. Diskusinya dengan warek satunya. Jadi, apa sih sebetulnya permasalahan revisi itu. Karena itu tadi, karena permasalahan yang pertama, karena memang itu implementasi dari program pak rektor, One Semester One Article itu” (Agustian, komunikasi personal, 27 Agustus 2024

Perpustakaan Universitas Airlangga

Perpustakaan Universitas Airlangga mengembangkan repositori TA berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 46 Tahun 2016. Peraturan ini dapat diakses melalui situs web perpustakaan <https://lib.unair.ac.id>. Repositori Universitas Airlangga mengalami beberapa kali pergantian sistem. Sistem pertama yang dikembangkan adalah *Airlangga Digital Library Network* (ADLN) yang dibangun menggunakan aplikasi GDL pada 2000-an. Pada 2017, Universitas Airlangga memutuskan bermigrasi ke repositori berbasis *EPrints* dengan alamat <https://repository.unair.ac.id/>. Selanjutnya Universitas Airlangga juga mengembangkan *Airlangga Integrated Library System* (AILIS) dengan aplikasi *INLISLite* milik Perpustakaan Nasional. Repositori terbaru ini beralamatkan di <https://ailis.lib.unair.ac.id/>. Repositori *EPrints* yang telah ada

sebelumnya tetap dipertahankan, tetapi tidak memuat koleksi TA terbaru dan didominasi oleh koleksi lama. Sebagian kecil karya di repositori *EPrints* tersedia secara akses terbuka, seperti TA mahasiswa Prodi Keperawatan.

Pergantian sistem yang terjadi juga membawa pada perubahan kebijakan. Perpustakaan Universitas Airlangga menutup akses publik untuk repositori yang terbaru dan hanya menyediakan akses untuk pemustaka internal. Masyarakat yang ingin mengakses koleksi di repositori AILIS harus mengunjungi perpustakaan secara fisik dan membayar biaya. Perubahan kebijakan ini belum terdokumentasikan secara tertulis. Dalam merumuskan kebijakan, pimpinan perguruan tinggi, manajemen perpustakaan, dan pustakawan bertemu dan melakukan rapat bersama dengan perwakilan fakultas dan unit-unit yang lain. Manajemen perpustakaan juga menyebutkan adanya kepentingan publikasi artikel mahasiswa di jurnal yang mempengaruhi kebijakan model publikasi TA di repositori Universitas Airlangga.

“Kita terlibat untuk menyusun klausul, seluruh pasal per pasal... Harus mementingkan kebutuhan dari universitas. Nah, dari para dosen itu kan punya target-target sendiri sehubungan dengan karya ilmiahnya. Sehingga kita mencoba untuk membangun lagi repository itu” (Oktavina, komunikasi personal, 2 Oktober 2024)

Perpustakaan ITS

Perpustakaan ITS telah merintis repositori sejak 2004 dengan memanfaatkan platform GDL yang kemudian dialihkan ke repositori berbasis *EPrints* pada 2016. Perpustakaan ITS memiliki dua kebijakan untuk mengatur repositori, yaitu SK Rektor Nomor 5455 5/12/LL/2008 tentang Wajib Serah Simpan Karya dan Surat Edaran Nomor 058059/IT2/TU.00.01/2016 tentang Perubahan Kebijakan Wajib Unggah Paper dan TA/Thesis/Disertasi. SK dan SE tersebut tidak tersedia di situs repositori maupun situs web perpustakaan dan hanya dapat diperoleh dari pustakawan. Kebijakan repositori ITS merupakan hasil kesepakatan antara

pimpinan perguruan tinggi dan manajemen perpustakaan, terutama selama periode 2007 hingga 2016. Adanya SE yang dikeluarkan pada 2016 menandai perubahan kebijakan berupa penerimaan TA dalam satu berkas lengkap tanpa ada pemecahan per bab dan pemberlakuan embargo wajib selama dua tahun. Sebelum itu, Perpustakaan ITS menerapkan akses terbuka segera untuk hampir seluruh karya TA.

Periode embargo di repositori ITS diterapkan untuk menghindari publikasi ganda dan mendorong penerbitan karya mahasiswa ke dalam jurnal. Selama dua tahun, mahasiswa diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya mereka di jurnal. Jika sudah melewati masa embargo tersebut, mahasiswa bisa meminta perpustakaan untuk membuka akses karya mereka.

“Belum (ada pembaruan SK). Pada zamannya Pak Joni yang terkait itu. Dulu pada 2014, kita menyerahkan banyak itu (dokumen TA) terpisah, jadi satu TA dipecah bisa jadi banyak file. Kemudian di zamannya Pak Joni itu akhirnya dia mengeluarkan aturan, edaran bahwa file-file itu tidak perlu dipisah. Kemudian, di situ ada aturannya juga untuk ditutup 2 tahun” (Febrina, 30 Agustus 2024)

Perpustakaan UK Petra

Perpustakaan UK Petra menyediakan pedoman tata tulis TA untuk mahasiswa yang dapat diunduh di situs web perpustakaan. Pedoman ini tidak dapat disebut sebagai dokumen kebijakan repositori, melainkan kebijakan pra publikasi. Kepala Perpustakaan UK Petra, terutama periode sebelumnya, dipandang memiliki peran cukup besar dalam membangun dan mengembangkan repositori. Kepala perpustakaan mengajak para pihak yang berkepentingan, termasuk jajaran rektor dan senat, serta pimpinan fakultas dan unit LPPM, untuk membahas upaya merintis repositori TA sekaligus merumuskan pedoman tata tulis TA yang berlaku untuk seluruh mahasiswa. Perpustakaan UK Petra memiliki sistem sendiri untuk pengelolaan koleksi repositori mereka, yaitu SPEKTRA (Sistem Informasi Perpustakaan Universitas Kristen Petra).

Manajemen perpustakaan saat ini juga memastikan tidak ada perubahan komitmen mereka untuk mendukung akses terbuka. Salah satu bentuk komitmen itu adalah Perpustakaan UK Petra secara kontinyu menyamakan pemahaman dengan perwakilan fakultas terkait repositori dan melakukan revisi minor dalam pedoman format penulisan karya ilmiah jika diperlukan.

“Sebelumnya kita mengusulkan. Kita kebetulan perpustakaan kan berelasi dengan orang-orang yang berpengaruh, nah itu yang kita ajak. Sehingga, dengan orang-orang yang berpengaruh itu prodi-prodi menerima gitu loh. Dengan adanya tim perumus ini adalah intinya orang-orang penting di kampus lah mungkin ya rektor, WR atau apa gitu di sini masuk, jadi awalnya ini panitia perumus dulu ini harus dibuat” (Septian, komunikasi personal, 20 September 2024)

Sebagai perguruan tinggi swasta, UK Petra relatif lebih diuntungkan dengan kelonggaran dan fleksibilitas dalam organisasi. Hal ini terlihat dari proses pengembangan repositori TA yang melibatkan banyak pihak, termasuk dari luar perpustakaan dan merupakan inisiatif dari bawah. Kebijakan repositori di UK Petra dirumuskan secara bersama-sama dengan tidak semata-mata mengikuti instruksi manajemen perguruan tinggi, tetapi juga melihat kebutuhan jurusan dan perpustakaan. Temuan ini selaras dengan hasil studi sebelumnya yang mengungkapkan bahwa salah satu faktor penting dalam keberhasilan dan keberlanjutan repositori adalah adanya kepemimpinan kolaboratif yang melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan (Seaman, 2017). Keputusan untuk mengembangkan sistem sendiri juga merupakan hasil dari pertemuan tersebut. Repositori TA mereka saat ini dapat diakses satu pintu melalui situs web perpustakaan <https://dewey.petra.ac.id/digital>. Sama dengan ketiga kampus lainnya, UK Petra juga mendukung kebijakan publikasi karya TA ke jurnal dengan menerapkan embargo yang bersifat sukarela.

2. Kebijakan terkait konten repositori TA

Fokus utama penelitian ini ada pada sejumlah aspek krusial dalam tata kelola repositori yang meliputi: model publikasi, periode penerapan embargo, perlindungan data dan privasi, hak cipta dan lisensi, penggunaan ulang data, serta kriteria dan prosedur pelaporan penurunan karya. Secara umum, keempat perpustakaan belum merumuskan kebijakan repositori mereka secara rinci. Kebijakan yang ada lebih ditujukan untuk mengakomodir kebutuhan manajemen perguruan tinggi, yaitu mengejar peningkatan jumlah publikasi. Aspek mendasar, seperti pemilihan model publikasi, tidak dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen kebijakan yang ada. Penelitian menemukan empat variasi model publikasi di keempat perguruan tinggi, yaitu akses terbuka segera, akses terbuka tertunda, akses terbatas, dan akses tertutup.

Kebijakan repositori di keempat perpustakaan secara umum masih dipengaruhi oleh pendekatan dari pimpinan ke bawahan dengan tingkatan berbeda-beda di keempat perguruan tinggi. Hal ini ditandai dengan adanya instruksi khusus dari rektor kepada kepala dan pengelola perpustakaan untuk mengakomodasi kebutuhan penerbitan karya. Keputusan yang diambil berupa pembatasan akses dan kebijakan embargo, baik yang wajib maupun tidak. Semua repositori, kecuali UK Petra, melakukan tindakan ketat dengan menerapkan embargo ke seluruh TA mulai dari dua hingga tiga tahun, dan dalam praktiknya, hingga waktu yang tidak ditentukan. Hasil ini berbeda dengan penelitian terhadap 100 repositori TA di 63 negara yang mayoritas menawarkan embargo sebagai opsi sukarela (Rasuli et al., 2023). Seluruh dokumen kebijakan dan pedoman repositori di keempat perguruan tinggi juga belum menjelaskan komitmen perpustakaan terhadap akses terbuka dan mekanisme pembukaan akses setelah periode embargo usai. Repositori UK Petra menjadi satu-satunya yang menerapkan akses terbuka segera dalam studi ini.

Masalah jangka waktu embargo telah lama menjadi perdebatan di kalangan pakar komunikasi ilmiah (Rasuli et al., 2023). Cepat atau lamanya periode embargo disebut mempengaruhi keberlanjutan ekonomi aktor-aktor yang terlibat dalam siklus komunikasi ilmiah, terutama penerbit komersial. Jika embargo terbilang cepat, maka ada keuntungan finansial yang rentan hilang. Namun, sebaliknya, ada yang beranggapan bahwa masa embargo yang lama tidak selaras dengan semangat era digital yang menuntut pertukaran informasi serba cepat. Pihak yang kontra juga menekankan bahwa profit ekonomi selama ini tidak sejalan dengan kepentingan publik. Jika dilihat dari konteks hasil penelitian ini, masalah embargo di perguruan tinggi Indonesia lebih berkaitan dengan kekhawatiran adanya publikasi ganda. Kekhawatiran yang dialami oleh dosen dan mahasiswa adalah naskah yang terdeteksi kemiripan di alat pendeteksi plagiarisme. Meski karya TA tergolong sebagai pra-cetak, tidak semua pihak bisa memahami hal ini. Keresahan terkait publikasi karya TA menjadi monograf dan artikel jurnal tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain, seperti Inggris (Gilliam & Daoutis, 2019) dan Kanada (Dawson & Langrell, 2023).

Jika melihat pada prinsip kesegeraan yang melekat pada akses terbuka, kebijakan embargo sepatutnya dibuat seketat mungkin dan hanya diterapkan pada kasus-kasus tertentu. Banyak perguruan tinggi yang menerapkan embargo, tapi tetap membagikan akses ke metadata dan beberapa bagian karya terbaru, antara lain abstrak, pendahuluan, dan pernyataan persetujuan dosen pembimbing (Rasuli et al., 2023). Praktik ini sudah dijalankan oleh UIN Sunan Ampel, ITS, dan UK Petra. Praktik pembatasan karya repositori sebenarnya tidak hanya bisa melalui aturan embargo, tetapi juga dengan sistem pengendalian akses. Prosedur teknisnya adalah dengan menyediakan formulir permintaan data pengguna secara elektronik yang wajib diisi. Model akses ini bertujuan menyaring orang-orang yang bisa mengakses karya tertentu. Selain itu, pengelola repositori bisa memastikan karya

TA tetap dapat dibagikan secara luas kepada peneliti yang tepercaya dan bertanggung jawab, sekaligus tetap melindungi privasi subjek data dan terkadang juga peneliti (Dove & Nayha, 2021). Salah satu repositori yang telah menerapkannya adalah Apollo milik Universitas Cambridge.

Kebijakan repositori perguruan tinggi tentu tidak terlepas dari pengaruh budaya setempat. Hal ini juga terlihat dari bagaimana perguruan tinggi menentukan model publikasi TA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi secara dominan menentukan model publikasi TA secara keseluruhan. Semua karya di tiga repositori PTN di diembargo dengan mengabaikan kemungkinan adanya mahasiswa yang tidak mempublikasikan karya mereka ke jurnal. Idealnya, jika karya tidak memenuhi kriteria embargo, maka karya tersebut bisa dengan segera dibuka aksesnya, kecuali jika ada pertimbangan lain. Pertimbangan lain tersebut misalnya berkaitan dengan kualitas karya TA yang dipandang kurang bagus. Praktik penyaringan karya berdasarkan nilai ini telah diterapkan di repositori UK Petra. Perpustakaan bisa menentukan kriteria pengajuan embargo dan pilihan kurun waktunya. Kriteria yang umum adalah terkait kepentingan publikasi, komersialisasi, isu keamanan dan perlindungan data, perjanjian dan kontrak dengan lembaga penyandang dana, serta isu terkait etika (Rasuli et al., 2023). Sedangkan kurun waktu embargo yang bisa ditawarkan adalah mulai enam bulan hingga dua tahun dan bahkan penutupan akses secara permanen jika diperlukan.

Selain itu, faktor budaya nasional dan regional mungkin mempengaruhi cara pandang perguruan tinggi terhadap mahasiswa sebagai individu. Perguruan tinggi di Inggris, misalnya, mendorong mahasiswa S3 untuk mempublikasikan karya secara akses terbuka (Gilliam & Daoutis, 2019), meski kadang harus diembargo atau dibatasi terlebih dulu. Perguruan tinggi yang diteliti dalam studi ini masih cenderung mengambil jalan cepat dengan memberlakukan kebijakan kolektif yang

mengikat. Namun, sejauh ini belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membandingkan kultur Barat-Timur dan pengaruhnya dalam penerapan akses terbuka pada repositori TA.

Perpustakaan perguruan tinggi dalam penelitian ini masih terkesan belum serius merumuskan dan mendokumentasikan kebijakan repositori mereka. Hal ini antara lain terlihat dari dokumen kebijakan yang belum komprehensif dan sebagian masih merupakan salinan utuh rekomendasi kebijakan akses terbuka minimum SHERPA Jisc UK. Daftar kebijakan tersebut belum disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia maupun penyesuaian dengan konteks perguruan tinggi setempat. Hasil temuan juga menunjukkan bahwa sebagian besar kebijakan repositori TA belum disertai petunjuk teknis yang memadai. Banyak pula kebijakan yang masih berbasis lisan dan tidak tertulis. Ketiadaan kebijakan berpotensi membingungkan pustakawan sebagai pengelola repositori, mahasiswa sebagai pemilik karya, dan publik sebagai pengguna.

Kebijakan yang setidaknya harus ada di repositori TA antara lain adalah perjanjian deposit (menyangkut hak cipta dan pernyataan kepemilikan, dan sebagainya), kebijakan pengunggahan, perlindungan data, penggunaan ulang data, serta kebijakan pelaporan dan penurunan karya. Jika dilihat dari aspek hak cipta dan kepemilikan karya, Perpustakaan UIN Sunan Ampel dan Perpustakaan UK Petra telah mensyaratkan adanya lembar pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademik dalam TA. Pernyataan ini merupakan perjanjian penyerahan antara perpustakaan dan mahasiswa sebagai pemilik karya. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh mahasiswa tersebut berisi pemberian Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif kepada perpustakaan. Implikasinya, perpustakaan memiliki hak-hak tertentu terhadap karya, seperti menyimpan, mengalihmediakan, dan seterusnya tanpa melanggar hak intelektual pemilik karya.

Terkait dengan lisensi terbuka, keempat repositori tidak ada yang menyertakan informasi mengenai lisensi *Creative*

Commons yang digunakan. Lisensi ini sebenarnya bisa menjadi sarana edukasi masyarakat mengenai konsep hak cipta dan lisensi terbuka. Lisensi terbuka ‘mengubah’ karya yang sebelumnya “*All Rights Reserved*” menjadi “*Some Rights Reserved*” (Rai, 2024), yang artinya pencipta karya secara suka rela membagikan sebagian haknya dengan pembaca. Bagi perpustakaan dan pemilik karya, ini menjadi jalan tengah dalam usaha berbagi pengetahuan di era digital. Lisensi terbuka masih berada dalam kerangka hukum hak cipta dan keduanya tidak bertentangan (Kreutzer, 2015). Karya berlisensi terbuka tetap menjadi milik penciptanya dan jika ada penyalahgunaan, maka pemilik karya bisa menarik lisensi dan memproses kasusnya secara hukum (McKiernan et al., 2016). Pustakawan dan unit terkait, misalnya biro hukum universitas, bisa merekomendasikan jenis lisensi yang dipandang paling sesuai untuk koleksi TA. Penyertaan lisensi terbuka juga bermanfaat untuk meluruskan kesalahpahaman sejumlah pihak mengenai konsep akses terbuka pada repositori.

Keempat repositori belum mencantumkan pernyataan mengenai penggunaan ulang data. Data dan informasi dalam TA yang tersedia secara akses terbuka merupakan bagian dari praktik berbagi data. Upaya berbagi data bertujuan untuk mereproduksi penelitian, membuat aset publik berupa hasil riset tersedia untuk masyarakat, meningkatkan investasi dalam penelitian, dan memajukan penelitian dan inovasi (Borgman, 2015). Perpustakaan bisa memberikan pernyataan tentang sejauh mana data dan informasi dalam TA bisa dimanfaatkan ulang, misalnya untuk keperluan sitasi dan replikasi penelitian. Meskipun sebenarnya ini telah diatur dalam pernyataan lisensi, tidak semua pengguna dan peneliti telah memahami konsep penggunaan ulang data. Jika ada permohonan penggunaan ulang data yang dipandang substantif, misalnya instrumen penelitian, perpustakaan juga perlu merumuskan bagaimana pendekatannya. Replikasi penelitian sebenarnya adalah praktik yang wajar dan umum dilakukan, terutama bagi

mahasiswa S1 yang masih dalam tahap meningkatkan pengalaman penelitian dan mempelajari proses riset (Moreau & Wiebels, 2023). Namun, tidak semua peneliti telah memahami hal ini. Untuk menghindari timbulnya konflik, perpustakaan bisa mendorong pengguna untuk mengajukan izin terlebih dulu kepada peneliti sebelum melakukan replikasi.

Penelitian belum menemukan repositori TA yang secara khusus menuliskan pernyataan dan informasi perlindungan data dan privasi. Saat ini, kebijakan nasional yang mengatur tentang perlindungan data dan privasi yaitu UU Pelindungan Data Pribadi telah berlaku sejak 17 Oktober 2024 (Kristianti, 2024). Regulasi ini bisa menjadi dasar dan pendorong bagi perguruan tinggi untuk mulai mengkaji aspek-aspek repositori yang bersentuhan dengan perlindungan data dan privasi, misalnya kebijakan privasi situs web dan penggunaan *cookies*. Jika dihubungkan dengan kebijakan pra publikasi, perpustakaan bersama komite etika riset atau lembaga penelitian bisa ikut memberi masukan tentang format karya TA sehingga tidak menyalahi prinsip perlindungan data dan etika riset. Dokumen kebijakannya bisa berwujud kebijakan riset dan pra-publikasi. Perpustakaan juga perlu mendokumentasikan kebijakan mengenai prosedur pelaporan kasus jika pelanggaran data terhadap koleksi repositori terjadi.

Terkait prosedur permintaan penurunan karya atau penutupan aksesnya dari repositori, keempat perpustakaan belum memiliki informasi prosedur secara tertulis. Kebijakan yang selama ini ada masih berbasis lisan, bersifat insidental, dan kasuistik. Para narasumber menyatakan bahwa mereka biasanya menerima laporan dan permintaan penurunan melalui pertemuan secara langsung, surel, saluran telepon, dan aplikasi pesan *WhatsApp*. Pustakawan dalam hal ini bisa merumuskan secara tertulis kriteria karya yang bisa diturunkan dari akses publik, jangka waktu pengurusan pelaporan, hingga informasi kontak resmi pengelola repositori. Tiga repositori PTN sudah mengunggah kriteria tersebut di situs web repositori mereka, tetapi

masih dalam bahasa Inggris saja. Sebagai bentuk himbauan dan peringatan bagi pengguna, perpustakaan perlu menyertakan tautan ke situs ANJANI (Anjungan Integritas Akademik Indonesia) yang memuat indikator dan spesifikasi pelanggaran akademik serta rekomendasi sanksi bagi pelanggarnya.

E. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, keempat repositori yang diteliti telah berusaha merumuskan dan mengembangkan kebijakan dan tata kelola repositori mereka masing-masing, tetapi belum semuanya telah mendokumentasikannya dengan baik. Proses perumusan juga telah melibatkan pimpinan perguruan tinggi dan manajemen perpustakaan. Pengambilan keputusan kebijakan secara umum didominasi oleh pendekatan pimpinan ke bawahan dengan rektor dan jajarannya sebagai pengambil kebijakan dan perpustakaan sebagai pelaksananya. Ini menunjukkan bahwa kebijakan repositori masih sangat ditentukan oleh pimpinan, terutama di tiga perguruan tinggi negeri. Peran pustakawan dalam meningkatkan kesadaran dan mengadvokasi akses terbuka masih banyak diperlukan. Kebijakan terkait konten di semua repositori TA masih belum komprehensif. Fokus utama kebijakan yang ada saat ini adalah untuk mengakomodasi kepentingan manajemen perguruan tinggi, yaitu meningkatkan jumlah publikasi lewat pembatasan akses dan embargo. Sebagai akibatnya, aspek tata kelola repositori masih terkesampingkan. Sejumlah aspek yang masih luput dirumuskan dan didokumentasikan adalah pernyataan tentang model publikasi yang diterapkan, pernyataan tentang perlakuan ke karya TA yang telah melewati masa embargonya, pernyataan tentang perlindungan data dan privasi serta penggunaan ulang data, serta informasi dan prosedur pelaporan dan penurunan karya. Peneliti menyarankan adanya penelitian lanjutan yang membandingkan kebijakan repositori antara perguruan tinggi negeri dan swasta untuk melihat bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap pengelolaan repositori TA. Selain itu, perlu ada studi

mengenai dampak repositori TA di kalangan masyarakat umum. Ini bisa membantu perpustakaan dan manajemen perguruan tinggi untuk melihat sejauh mana karya mahasiswa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas, di luar lingkup akademis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, U. A., & Kaur, K. (2021). Driving forces behind the management of Institutional Repositories: Qualitative evidences. *Malaysian Journal of Library and Information Science*, 26(3), 33-56. <https://doi.org/10.22452/mjlis.vol26no3.2>
- Ali, A. F., & Saleem, Q. U. A. (2021). Open access resources as an opportunity for academic libraries during pandemic: A study. *Library Philosophy & Practice*, 1–20.
- Anderson, R. (2018). *Scholarly communication: What everyone needs to know*. Oxford University Press.
- Arvelina, E., Tresnawaty, Y., & Gemalia, I. (2022). Evaluasi pemanfaatan aplikasi GDL (Ganesha Digital Library) sebagai aplikasi repositori di Politeknik Negeri Bandung. *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan Dan Kearsipan*, 24(1), 23–35. <https://doi.org/10.7454/JIPK.v24i1.003>
- Bashir, S., Gul, S., Bashir, S., Nisa, N. T., & Ganaie, S. A. (2022). Evolution of institutional repositories: Managing institutional research output to remove the gap of academic elitism. *Journal of Librarianship and Information Science*, 54(3), 518–531. <https://doi.org/10.1177/09610006211009592>
- Borgman, C. L. (2015). *Big data, little data, no data: Scholarship in the networked world*. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9963.001.0001>
- Darragh, J., Narlock, M. R., Burns, H., Cerda, P. A., Cowles, W., Delserone, L., Erickson, S., Herndon, J., Imker, H., Johnston, L. R., Lake, S., Lenard, M., Mohr, A. H., Moore, J., Petters, J., Pullen, B., Taylor, S., & Wham, B. (2024). Institutional data repositories are vital. *Science*, 385(6714), 1174–1174. <https://doi.org/10.1126/science.adr0789>
- Dawson, D., & Langrell, K. (2023). More obstacles for the graduate student author: Open access ETDs trigger plagiarism detectors. *Journal of Graduate Librarianship*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.59942/2995-9063.1002>
- Dove, E., & Nayha, S. (2021). Tools, processes and actors: Introduction. In A. Ganguli-Mitra, A. Sorbie, C. McMillan, E. Dove, E. Postan, G. Laurie, & N. Sethi (Eds.), *The Cambridge Handbook of Health Research Regulation* (pp. 99–102). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108620024.013>
- Fahey, A., Freestone, C., Russell, F., & Savage, C. (2016). *Bridging the copyright and licensing knowledge gap* [Report]. Deakin University. https://dro.deakin.edu.au/articles/report/Bridging_the_copyright_and_licensing_knowledge_gap/20916124/3
- Gilliam, C., & Daoutis, C. (2019). Can openly accessible e- theses be published as monographs? A short survey of academic publishers. *The Serials Librarian*, 75(1–4), 5–12. <https://doi.org/10.1080/0361526X.2019.1589633>
- Hidayanto, A. N., Puspa, D., Soegiharto, A., & Munajat, Q. (2020). Data privacy, what still need consideration in online application system? *Jurnal Sistem Informasi*, 16(1), 49–63. <https://doi.org/10.21609/jsi.v16i1.941>
- Holzman, A., & Lippincott, S. K. (2019). Libraries. In A. Phillips & M. Bhaskar (Eds.), *The Oxford Handbook of Publishing*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198794202.013.19>
- Kirkman, N., & Haddow, G. (2021). Publisher embargoes and institutional repositories: A case study of journal articles subject to an Australian funder mandate. *Information Research*, 26(3),

- paper 907.
<https://doi.org/10.47989/irpaper907>
- Kreutzer, T. (2015). *Konten terbuka: Pedoman praktis penggunaan lisensi Creative Commons* (A. Q. Sudharto, Trans.). Wikimedia Indonesia.
- Kristianti, L. (2024, October 17). *Dirjen Aptika pastikan UU PDP sudah berlaku sepenuhnya*. Antara News. <https://www.antarane.ws.com/berita/4404977/dirjen-aptika-pastikan-uu-pdp-sudah-berlaku-sepenuhnya>
- Loan, F. A., & Shah, U. Y. (2020). Global electronic thesis and dissertation repositories – collection diversity and management issues. *Insights*, 33(1), 1–19. <https://doi.org/10.1629/uksg.524>
- Logullo, P., Beyer, J. A. de, Kirtley, S., Schlüssel, M. M., & Collins, G. S. (2024). Open access journal publication in health and medical research and open science: Benefits, challenges and limitations. *BMJ Evidence-Based Medicine*, 29(4), 223–228. <https://doi.org/10.1136/bmjebm-2022-112126>
- McKiernan, E. C., Bourne, P. E., Brown, C. T., Buck, S., Kenall, A., Lin, J., McDougall, D., Nosek, B. A., Ram, K., Soderberg, C. K., Spies, J. R., Thaney, K., Updegrove, A., Woo, K. H., & Yarkoni, T. (2016). How open science helps researchers succeed. *eLife*, 5, 1–19. <https://doi.org/10.7554/eLife.16800>
- Moreau, D., & Wiebels, K. (2023). Ten simple rules for designing and conducting undergraduate replication projects. *PLOS Computational Biology*, 19(3), 1–11. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1010957>
- Moser, A., & Korstjens, I. (2017). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 1: Introduction. *The European Journal of General Practice*, 23(1), 271–273. <https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375093>
- Nurohman, A., & Aprillilah, A. (2024). Riset kebijakan publikasi repositori institusi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Indonesia. *Al-Kuttab : Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 6(1), 52–70. <https://doi.org/10.24952/ktb.v6i1.10443>
- Pratama, Y. B. (2018). *Kebijakan open access institutional repository: Studi multisitus pada 3 (tiga) perguruan tinggi negeri di Malang* [Undergraduate thesis, Universitas Brawijaya]. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/166078/>
- Priyanto, I. F. (2015). *Readiness of Indonesian academic libraries for open access and open access repositories implementation: A Study on Indonesian open access repositories registered in OpenDOAR* [Doctoral dissertation, University of North Texas]. <https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc804888/>
- Rai, P. (2024). For ‘all rights reserved’ to ‘some rights reserved’: Open licensing to scholarly publication. *World Digital Libraries*, 17(1), 29–40. <https://doi.org/10.18329/09757597/2024/17103>
- Rasuli, B., Schöpfel, J., Boock, M., & Van Wyk, B. (2023). Access and impact barriers to academic publications: A global study of thesis and dissertation embargo policies. *Online Information Review*, 47(6), 1208–1222. <https://doi.org/10.1108/OIR-09-2022-0497>
- Rodliyah, U. (2023). Librarian’s perception of open access repository policy in Islamic State University Indonesia. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 11(2), 227–240. <https://doi.org/10.24198/jkip.v11i2.46758>
- Sandt, S. van de, Dallmeier-Tiessen, S., Lavasa, A., & Petras, V. (2019). The definition of reuse. *Data Science Journal*, 18(1), 1–19. <https://doi.org/10.5334/dsj-2019-022>
- Seaman, D. M. (2017). *Leading across boundaries: Collaborative leadership and the institutional repository in research universities and liberal arts colleges* [Doctoral dissertation,

- Simmons College].
<https://www.proquest.com/docview/1958944695>
- Tenny, S., Brannan, J. M., & Brannan, G. D. (2024). Qualitative study. In *StatPearls [Internet]*. StatPearls Publishing.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470395/>
- Turgut, Y. E., Aslan, A., & Denizalp, N. V. (2022). Academicians' awareness, attitude, and use of open access during the COVID-19 pandemic. *Journal of Librarianship and Information Science*, 54(3), 350–362.
<https://doi.org/10.1177/09610006211016509>
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2024). *Metodologi penelitian sosial* (3rd ed.). Bumi Aksara.
- Zhang, P. (2017). *A content-linking-context model and automatic copyright verification in the notice-and-take-down procedures* [Doctoral dissertation, University of Southampton].
<https://eprints.soton.ac.uk/416475/>
- Zuntriana, A. (2017). *Advocating for open access: Open access advocacy practices in Indonesian higher education institutions and their impacts on the sustainability of institutional repositories* [Master thesis, The University of Sheffield].
<http://repository.uin-malang.ac.id/15748/>

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Karakteristik demografi informan

Nama	Pendidikan	Jenis kelamin
Agustian	S2	Laki-laki
Oktavina	S2	Perempuan
Febrina	S1	Perempuan
Septian	S2	Laki-laki

Sumber: Data primer diolah, tahun 2024